



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : T. AZNAL ZAHRI
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 721511

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.708.890.000

1. Tanah Seluas 64 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 76.800.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 431 m2/465 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
4. Tanah Seluas 349 m2 di KAB / KOTA ACEH UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 99.000.000
5. Bangunan Seluas 28 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
6. Bangunan Seluas 24 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000
7. Tanah Seluas 10230 m2 di KAB / KOTA ACEH TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 143.220.000
8. Tanah Seluas 378 m2 di KAB / KOTA ACEH TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 5.292.000
9. Tanah Seluas 327 m2 di KAB / KOTA ACEH TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 4.578.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 80.000.000

1. MOBIL, MERCEDES BENZ S320 Tahun 1997, HIBAH TANPA AKTA Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 1.248.940.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	592.324.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.630.154.000
III. HUTANG	Rp.	112.178.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.517.976.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.